



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur tahun 2024 dapat terselesaikan sesuai ketentuan.

LKjIP dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur dalam dalam pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan organisasi selama tahun 2024, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur tahun 2024 memuat tujuan, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kedua Tahun 2019-2024. Pengukuran capaian kinerja diukur dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan hasil yang dicapai selama kurun waktu tahun 2024. Dengan demikian akan dapat diketahui seberapa jauh pencapaian target kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaannya terhadap sumber daya yang dimiliki selama tahun 2024. Laporan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur tahun 2024 juga memuat realisasi penyerapan anggaran selama tahun 2024.

Demikian LKjIP Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur tahun 2024 disusun untuk dijadikan pertimbangan kebijakan dalam peningkatan kualitas kinerja ditahun mendatang.

Surabaya, 30 Januari 2025

**KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



Dr. ANDRIYANTO, SH, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19660609 199001 1 001

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| DAFTAR LAMPIRAN | iv |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Struktur Organisasi..... | 2 |
| B. Tugas dan Fungsi | 4 |
| C. Isu Strategis | 9 |
| D. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD). | 9 |
| | |
| BAB II : PERENCANAAN KINERJA..... | 12 |
| A. Ringkasan Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) 2019 - 2024 | 12 |
| B. Ringkasan Rencana Kerja Tahun 2024 | 13 |
| C. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 14 |
| | |
| BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA..... | 16 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi..... | 16 |
| B. Realisasi Anggaran | 42 |
| C. Capaian Kinerja Lainnya | 48 |
| | |
| BAB IV :PENUTUP | 54 |
| | |
| LAMPIRAN | 56 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1.1 Keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 dengan Perubahan Renstra Balitbang 2019-2024 | 10 |
| Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran | 13 |
| Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024 | 14 |
| Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 15 |
| Tabel 2.4 Anggaran Balitbang Tahun 2024 | 15 |
| Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2024 | 17 |
| Tabel 3.2 Indikator Kinerja Tahun 2024 | 24 |
| Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran I | 20 |
| Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran I | 21 |
| Tabel 3.5 Daftar Judul Penelitian dan Pengembangan | 21 |
| Tabel 3.6 Daftar Policy Brief Tahun 2024..... | 23 |
| Tabel 3.7 Peta Pemanfaatan Hasil Litbang | 24 |
| Tabel 3.8 Artikel Hasil Litbang yang Dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah, Buku, Proceeding, dan Pemakalah Tahun 2024..... | 26 |
| Tabel 3.9 Sosialisasi Hasil Litbang melalui Sosialisasi Tahun 2024..... | 30 |
| Tabel 3.10 Daftar Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual Tahun 2024 | 31 |
| Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran II | 32 |
| Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran III | 34 |
| Tabel 3.13 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja 6 (enam) Tahun Terakhir (Tahun 2019-2024)..... | 36 |
| Tabel 3.14 Analisa Perbandingan Indeks Inovasi Daerah dalam 4 (empat) Tahun Terakhir dalam Lingkup Nasional..... | 38 |
| Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap RPJMD | 39 |
| Tabel 3.16 Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2024 | 43 |
| Tabel 3.17 Perbandingan Hasil Capaian Kinerja dan Penganggaran | 43 |
| Tabel 3.18 Alokasi Per Sasaran Pembangunan..... | 45 |
| Tabel 3.19 Pencapaian Kinerja dan Anggaran | 47 |
| Tabel 3.20 Nilai IPKD dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir | 48 |
| Tabel 3.21 Nilai IKK dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir..... | 49 |
| Tabel 4.1 Capaian Kinerja Balitbang Tahun 2024 | 54 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur..... | 3 |
| Gambar 1.2 Bagan Cascading Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur..... | 11 |
| Gambar 3.1 Bagan Mekanisme Penjaringan Judul | 18 |
| Gambar 3.2 Bagan Mekanisme Penetapan Judul Penelitian | 19 |
| Gambar 3.3 Infografis Dolan Deso | 50 |
| Gambar 3.4 Foto Tangkapan Layar Aplikasi Stunting | 51 |
| Gambar 3.5 Foto Tangkapan Layar Aplikasi Jatim Berdasi | 52 |
| Gambar 3.6 Foto Penghargaan IGA..... | 53 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|--|---------|
| Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur..... | 56 |
| Lampiran 2 Cascading Kinerja Balitbang | 58 |
| Lampiran 2 Pohon Kinerja | 59 |

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, yang juga menjadi komponen dari prinsip *good governance* sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)

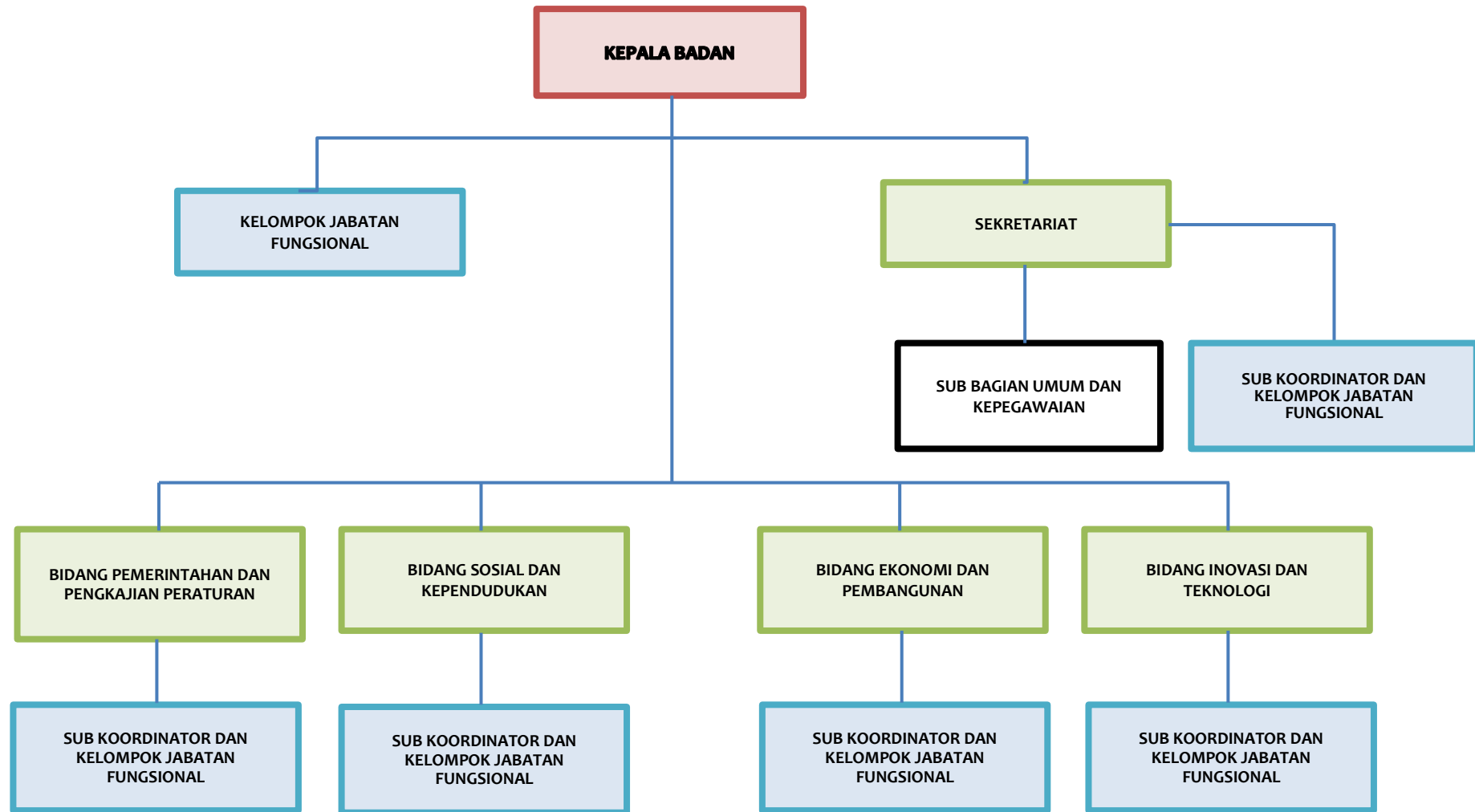
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta dalam rangka peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dengan memperhatikan Perubahan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

Laporan Akuntabilitas merupakan laporan yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dipercayakan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur selama Tahun 2024 atas penggunaan seluruh sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran. Tujuan dari laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai upaya perbaikan yang berkesimbangan dalam rangka meningkatkan kinerja dari Badan Penelitian dan Pengembangan dimasa yang akan datang.

A. Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut dan diperlihatkan sebagaimana Gambar 1.1.

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3) Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4) Bidang Sosial dan Kependudukan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5) Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- 6) Bidang Inovasi dan Teknologi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- 7) UPT; dan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2021

B. Tugas dan Fungsi

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur.

Tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi;
2. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi Pemerintahan Provinsi;
3. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi lingkup Pemerintahan Provinsi;
4. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Pemerintahan Provinsi;
5. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintahan Provinsi;
6. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
7. fasilitasi lembaga penelitian dan pengembangan kabupaten/kota;
8. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan;
9. pelaksanaan administrasi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi Pemerintahan Provinsi;
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Provinsi; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dan fungsi Sekretariat serta masing–masing Kepala Bidang di lingkungan BALITBANG Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
- j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
- g. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- e. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- f. pengoordinasian pembinaan teknis penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Bidang Sosial dan Kependudukan

Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam penelitian di bidang Sosial dan Kependudukan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Sosial dan Kependudukan, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- c. pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan kependudukan;

- e. pengoordinasian pembinaan teknis penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan.

4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. pengoordinasian pembinaan teknis penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

5. Bidang Inovasi dan Teknologi

Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Inovasi dan Teknologi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- b. penyusunan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode

- penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
 - e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
 - f. pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
 - g. pelaksanaan uji coba dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - h. pengoordinasian pembinaan teknis penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama. Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

C. Isu Strategis

Secara umum, isu strategis yang ada di Balitbang Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Belum optimalnya sinergitas kebijakan kelitbang.
2. Belum optimalnya pengembangan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah.
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi perumusan kebijakan pemerintah.
4. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi (linkage database) kegiatan kelitbang yang telah dilakukan oleh PD Kabupaten / Kota, PD Provinsi untuk menghindari tumpang tindih judul litbang serta kajian yang dilakukan.

D. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan Perubahan RPJMD)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki visi *“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”* yang tercantum di dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024 dan mempunyai 4 (empat) misi, antara lain :

- Misi ke-1 : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
- Misi ke-2 : Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
- Misi ke-3 : ***Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.***
- Misi ke-4 : Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Dalam mendukung program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, BALITBANG menyelenggarakan Misi ke-3 dari PRPJMD Provinsi Jawa Timur dan mendukung tujuan “*Terwujudnya Pemerintahan yang Baik.*” BALITBANG juga memberikan dukungan terhadap sasaran “*Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel*” di dalam PRPJMD Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya Visi Misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam Tabel 1.1. Keterkaitan PRPJMD Provinsi Jawa Timur dengan Perubahan Renstra Balitbang 2019-2024 sebagai berikut:

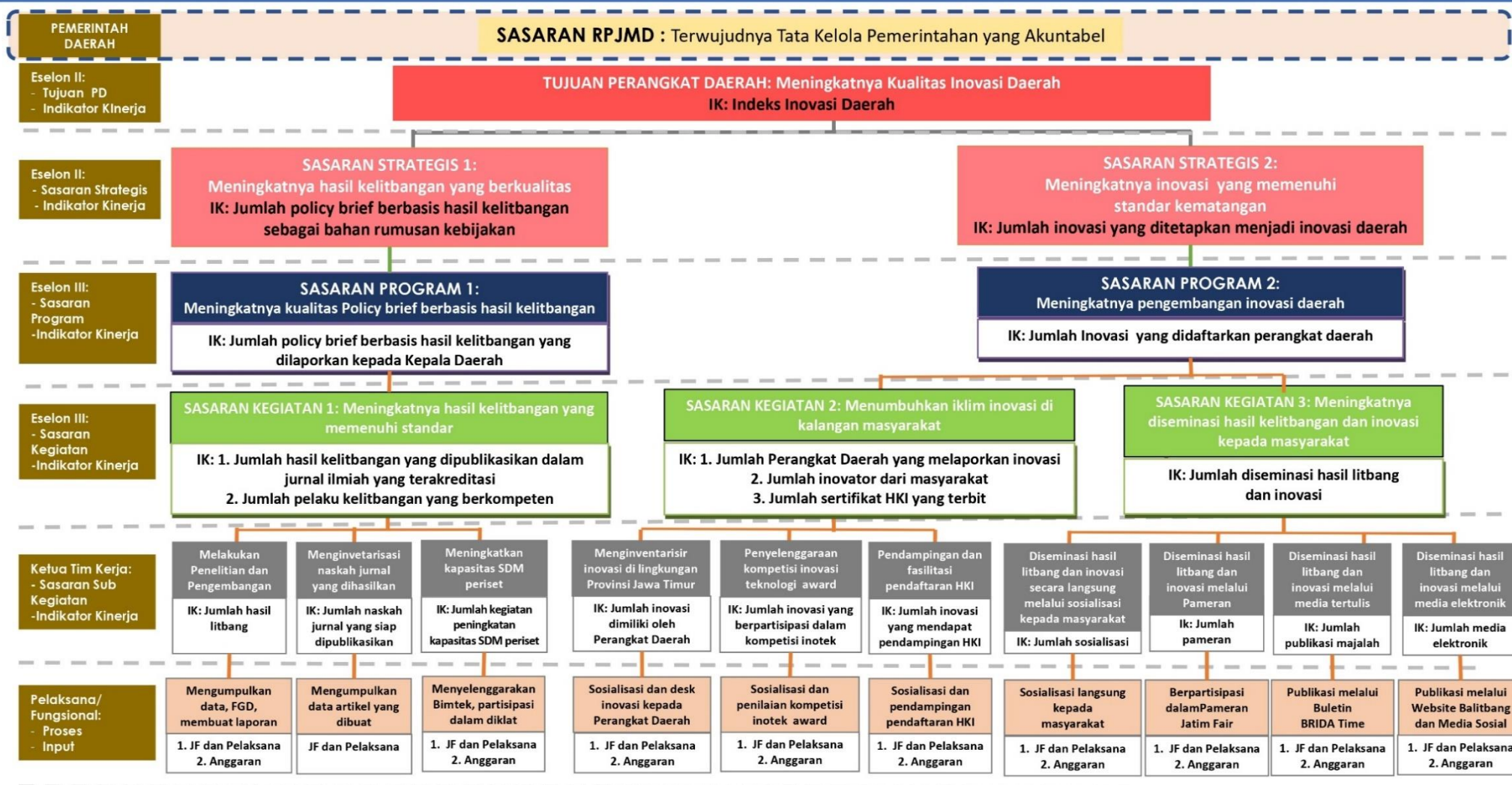
Tabel 1.1 Keterkaitan PRPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 dengan Perubahan Renstra Balitbang 2019-2024

| VISI: <i>Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong</i> | | | |
|---|--|--|--|
| MISI ke-3: <i>Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan</i> | | | |
| PRPJMD 2019-2024 | | RENSTRA PERUBAHAN BALITBANG 2019-2024 | |
| Tujuan | Sasaran | Tujuan | Sasaran |
| <i>Terwujudnya Pemerintahan yang Baik</i> | <i>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel</i> | Meningkatnya kualitas inovasi daerah | 1. Meningkatkan kualitas hasil kelitbangan <u>Indikator Sasaran:</u> a. Jumlah policy brief berbasis hasil kelitbangan b. Jumlah hasil kelitbangan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah |
| | | <u>Indikator Tujuan:</u> Predikat Inovasi Daerah | 2. Meningkatkan kuantitas inovasi daerah <u>Indikator Sasaran:</u> Jumlah Inovasi yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah |
| | | | 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah <u>Indikator Sasaran:</u> Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah |

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Balitbang Provinsi Jawa Timur dan sesuai dengan tugas pokok fungsi dan indikator kinerjanya, pada gambar 1.2 disajikan Bagan Cascading Kinerja Balitbang Provinsi Jawa Timur.

CASCADING

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR



Gambar 1.2 Cascading Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Perencanaan Kinerja merupakan proses memilih dan mengembangkan Tindakan yang terbaik, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan atau sasaran. Perencanaan suatu instansi pemerintah harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan berupa rencana strategis dan rencana kinerja, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

A. Ringkasan Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Perda nomor 6 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 52 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, berikut adalah Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.

1. Tujuan

Tujuan Badan Penelitian dan Pengembambangan Provinsi Jawa Timur adalah meningkatnya kualitas inovasi daerah.

2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan berdasarkan tujuan yang ada yaitu:

1. Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan;
2. Meningkatnya kuantitas inovasi daerah;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 2.1. Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Meningkatnya kualitas inovasi daerah | Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan | 1. Jumlah <i>Policy Brief</i> berbasis hasil kelitbangan | | | | 9 | 9 | 9 |
| | | 2. Jumlah hasil kelitbangan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 |
| | Meningkatnya kuantitas inovasi daerah | 1. Jumlah inovasi daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah | | | | 30 | 30 | 30 |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | 1. Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah | 81,15 | 81,17 | 83,38 | 83,60 | 83,80 | 84,00 |

B. Ringkasan Rencana Kerja Tahun 2024

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Balitbang Provinsi Jawa Timur tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai arahan sekaligus menjadi acuan bagi pemangku kegiatan bidang penelitian dan pengembangan iptek dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Litbang Iptek di Jawa Timur secara terpadu dan berkesinambungan. Renja Balitbang Provinsi Jawa Timur tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan serta kajian dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan daerah serta merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen Renja Balitbang Provinsi Jawa Timur tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Balitbang Provinsi Jawa Timur tahun 2019–2024 dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019–2024 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.

Penetapan sasaran strategis, indikator kinerja dan target Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2024 |
|--------------------------------------|---|---|-------------|
| Meningkatnya kualitas inovasi daerah | Meningkatnya hasil kelitbangan yang berkualitas | 1. Jumlah <i>Policy Brief</i> berbasis hasil kelitbangan | 9 |
| | | 2. Jumlah hasil kelitbangan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah | 10 |
| | Meningkatnya kuantitas inovasi daerah | 1. Jumlah inovasi daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah | 30 |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | 1. Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah | 84.00 |

C. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Balitbang Provinsi Jawa Timur telah menyusun dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh Kepala Balitbang Provinsi Jawa Timur dan Gubernur Jawa Timur, sebagai berikut:

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2024 |
|--------------------------------------|---|---|-------------|
| Meningkatnya kualitas inovasi daerah | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | 1. Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah | 84.00 |
| | Meningkatnya hasil kelitbangan yang berkualitas | 1. Jumlah <i>Policy Brief</i> berbasis hasil kelitbangan | 9 |
| | | 2. Jumlah hasil kelitbangan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah | 10 |
| | Meningkatnya kuantitas inovasi daerah | 1. Jumlah inovasi daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah | 30 |

Untuk mewujudkan target kinerja pada Tahun 2024, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp. 31.903.844.000,00 yang digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Tabel 2.4. Anggaran Balitbang Tahun 2024

| Program | Anggaran Awal | Anggaran Sesudah Perubahan |
|--|------------------------------|------------------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | Rp. 29.103.844.000,00 | Rp. 28.911.405.584,00 |
| 2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Rp. 2.800.000.000,00 | Rp. 3.200.000.000,00 |
| Jumlah | Rp. 31.903.844.000,00 | Rp. 32.111.405.584,00 |

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama satu tahun. Laporan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur tidak lepas dari rangkaian fungsi perencanaan yang dimulai dari RPJMD Jawa Timur 2019-2024, Rencana Strategis 2019-2024, Rencana Kerja Tahunan (Renja) 2024 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Secara umum penyusunan Laporan kinerja ini dimulai dengan menetapkan sasaran dan indikator kinerja serta rencana kinerja tahun 2024, mengukur pencapaian kinerja sasaran, kemudian mengevaluasi dan menyusun suatu kesimpulan. Evaluasi dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan dilaksanakan oleh 4 (empat) Bidang dan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur. Indikator kinerja ditetapkan secara realistis sesuai dengan tugas dan fungsi dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan di Badan penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Hal ini penting dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akandari seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

1. Analisis Target dan Capaian Kinerja Tahun Ini

Pengukuran capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur tahun 2024 diperoleh dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

$$\text{Capaian Indikator Kinerja (\%)} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran menggunakan skala pengukuran 4 kategori (Tabel 3.1).

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2024

| No | Presentase Capaian | Kategori Capaian |
|----|--------------------|------------------|
| 1 | Lebih dari 100 % | Sangat Baik |
| 2 | 76 % s/d 100 % | Baik |
| 3 | 55 % s/d 75% | Sedang/cukup |
| 4. | Kurang dari 55 % | Kurang |

Indikator kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 beserta targetnya diilustrasikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Indikator Kinerja Tahun 2024

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2023 | TARGET CAPAIAN (%) |
|--------------------------------------|--|--|-------------|--------------------|
| Meningkatnya kualitas inovasi daerah | 1. Meningkatkan hasil kelitbangan yang berkualitas | Jumlah policy brief berbasis hasil kelitbangan (Dokumen) | 9 | 100 |
| | | Jumlah hasil kelitbangan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah (Dokumen) | 10 | 100 |
| | 2. Meningkatkan kuantitas inovasi daerah | Jumlah Inovasi yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah (Inovasi) | 30 | 100 |
| | 3. Meningkatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah | Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah | 84,00 | 100 |

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN I: Meningkatkan hasil kelitbangan yang berkualitas

Indikator Kinerja Utama untuk mengukur sasaran "Meningkatnya hasil kelitbangan yang berkualitas" adalah jumlah policy brief berbasis hasil kelitbangan dan jumlah hasil kelitbangan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Untuk mencapai Sasaran I, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur menggunakan Metode Penjaringan Judul melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Penelitian dan Pengembangan, dengan mekanisme sebagai berikut:

a) Penjaringan Judul Penelitian

Sebelum menetapkan judul penelitian, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur membuat sistem *database terhadap* usulan penelitian baik secara internal maupun eksternal. Usulan-usulan penelitian ini dihimpun melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Litbang yang secara rutin dilaksanakan setiap tahunnya dengan mengundang segenap Peneliti, PD Provinsi, Akademisi, Kabupaten/Kota, serta Tim Pengendali Mutu (Gambar 3.1.). Tim Pengendali Mutu merupakan Tim khusus bentukan Balitbang yang beranggotakan dari unsur akademisi/universitas. Tim ini dibentuk dengan maksud menjaga kualitas hasil kelitbangan dari hulu hingga hilir. Tim Pengendali Mutu memiliki tugas utama dalam *controlling* proses penelitian dan pengembangan mulai dari judul, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Proposal penelitian, hingga jalannya penelitian dan pengembangan sampai dengan tersusunan Laporan Akhir Penelitian.



Gambar 3.1. Bagan Mekanisme Penjaringan Judul

b) Klasifikasi Judul Penelitian

Dari keseluruhan usulan yang masuk kemudian diseleksi dan dikelompokkan sesuai dengan 4 (empat) Bidang pelaksana kegiatan kelitbang, yaitu:

1. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
2. Bidang Sosial dan Kependudukan
3. Bidang Ekonomi dan Pembangunan
4. Bidang Inovasi dan Teknologi

Selanjutnya setiap Bidang menyusun mengolah dan menyusun judul penelitian dan pengembangan berdasarkan Tema Prioritas Provinsi Jawa Timur tahun 2024.

c) Penetapan Judul Penelitian

Tahapan setelah pengklasifikasian usulan adalah penetapan judul penelitian. Usulan judul diadaptasi dan disesuaikan dengan Tema Prioritas Provinsi Jawa Timur, baru kemudian ditentukan lokus penelitian (Gambar 3.2.).



Gambar 3.2. Bagan Mekanisme Penetapan Judul Penelitian

Definisi Penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk mengolah informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan permasalahan dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan kebijakan pemerintahan dalam negeri dan daerah. Berangkat dari hal tersebut, maka bisa dikatakan bahwa produk utama Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur dalam rangka pelaksanaan pembangunan

sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah berupa Dokumen Penelitian dan Pengembangan.

Namun dokumen hasil penelitian dan pengembangan tidak ada artinya apabila belum dimanfaatkan oleh stakeholders. Suatu hasil penelitian dapat dikatakan berguna bilamana hasil penelitian tersebut dapat bermanfaat baik untuk referensi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan obyek penelitian ataupun bahkan bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya dalam rangka perbaikan kinerja untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dalam rangka menjembatani hasil kelitbangan tersebut, dibuat risalah kebijakan (*policy brief*) yang memuat rekomendasi hasil kelitbangan. Untuk itu Indikator Kinerja Utama (IKU) Balitbang adalah “Jumlah policy brief berbasis hasil kelitbangan”.

Capaian Indikator Kinerja Utama sebagai alat pengukur keberhasilan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan provinsi Jawa Timur terhadap Sasaran I disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran I

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2024 | REALISASI 2024 | CAPAIAN 2024 (%) |
|--------------------------------------|---|--|-------------|----------------|------------------------------|
| Meningkatnya kualitas inovasi daerah | Meningkatnya hasil kelitbangan yang berkualitas | Jumlah policy brief berbasis hasil kelitbangan (Dokumen) | 9 | 9 | 100% (SANGAT BAIK) |
| | | Jumlah hasil kelitbangan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah (Dokumen) | 10 | 21 | 210% (SANGAT BAIK) |

Tabel 3.3 memperlihatkan Pencapaian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur terhadap Sasaran I dengan indikator “Jumlah policy brief berbasis hasil kelitbangan” adalah sebesar 100% yang termasuk dalam kategori **SANGAT BAIK**, dan “Jumlah hasil kelitbangan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah” adalah sebesar 210% yang termasuk dalam kategori **SANGAT BAIK**.

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 (*n*) dengan tahun 2023 (*n*-1) terhadap Sasaran I diperlihatkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran I

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2024 | REALISASI | |
|--------------------------------------|---|--|-------------|---------------------|-------------------|
| | | | | 2023 (<i>n</i> -1) | 2024 (<i>n</i>) |
| Meningkatnya kualitas inovasi daerah | Meningkatnya hasil kelitbangan yang berkualitas | Jumlah policy brief berbasis hasil kelitbangan (Dokumen) | 9 | 10 | 9 |
| | | Jumlah hasil kelitbangan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah (Dokumen) | 10 | 14 | 21 |

Pada tahun 2024, kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan adalah sebanyak 27 kegiatan. Jumlah ini sedikit lebih banyak dari jumlah penelitian dan pengembangan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 25 kegiatan. Hal ini disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga Balitbang Provinsi Jawa Timur mendapatkan tambahan anggaran pada waktu Perubahan APBD 2024.

Secara terinci, judul kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Daftar Judul Penelitian dan Pengembangan

| KEGIATAN DAN JUDUL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | |
|---|--|
| A Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | |
| 1. | Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengembangan Pariwisata Kawasan Pesisir Selatan Jawa Timur |
| 2. | Peran Instansi Pemerintah dalam Penanganan Kebocoran Ekspor, Impor, Enclave Tourism dan Relokasi Anggaran dalam Penyelenggaraan Pagelaran Wisata Skala Internasional |
| 3. | Evaluasi Pelaksanaan Regulasi Penetapan Upah Minimum Regional (UMR) di Jawa Timur |
| 4. | Model Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Tanpa Konflik |

| KEGIATAN DAN JUDUL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|---|
|---|

5. Strategi Kebijakan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Akibat Ancaman Dinamika Perekonomian Global
 6. Kreativitas Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif bagi Generasi Milenial
 7. Kajian Naskah Akademik Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi Jawa Timur
 8. Penguatan inovasi kecamatan melalui kebijakan pemberian bantuan keuangan
 9. Penguatan Strategi Kebijakan dalam Pengembangan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah
-

B Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

1. Pengembangan Potensi Seni Budaya Kelokalan Sebagai Produk Event Wisata Budaya Unggulan (Dalam Menggerakkan Kegiatan Event Wisata Di Daerah Tujuan Wisata Di Jawa Timur)
 2. Analisa Dampak Kebijakan Penurunan Tingkat Kemiskinan Ekstrim Terhadap Keberdayaan Keluarga Miskin Di Jawa Timur
 3. Mitigasi Angka Putus Sekolah Pendidikan Menengah Di Jawa Timur Berbasis Kolaboratif Government
 4. Analisa Faktor Determinan Penyebab Kejadian Demam Berdarah Dengue
 5. Strategi Pengembangan Kultur Riset Di Inkgungan Sekolah Menengah Atas Provinsi Jawa Timur
 6. Strategi Kebijakan Pengembangan Budaya Riset Dan Inovasi Di Jawa Timur
 7. Kolaborasi Antar Sektor Untuk Penanganan Anak Tidak Sekolah di Jawa Timur
-

C Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

1. Kajian Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Sumber Daya Manusia Bumdes Untuk Pengembangan One Village One CEO di Jawa Timur
 2. Kajian Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk Meningkatkan Potensi dan Daya Saing Daerah di Jawa Timur
 3. Kajian Penyusunan Produk Unggulan Daerah Provinsi Jawa Timur
-

-
4. Kajian Potensi dan Produk Unggulan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Sebagai Pilot Project Implementasi Communal Branding Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) di Jawa Timur
 5. Kajian Disersifikasi Produk Turunan Garam Rakyat Melalui Fortifikasi Garam
 6. Kajian Percepatan Penerapan Industri Hijau di Jawa Timur
 7. Kajian Pelestarian Keanekaragaman Ikan Endemik Lokal pada Perairan Umum Daratan (PUD) di Jawa Timur
 8. Kajian Dampak Ekonomi (Multi Player Effect) Sebelum dan Sesudah Beroperasinya Bus Trans Jatim
 9. Kajian Pengembangan Konektivitas dan Aksesibilitas Angkutan Umum di Wilayah Gerbangkertasusila
-

D Pengembangan Inovasi dan Teknologi

1. Pemanfaatan Potensi lokal sebagai Alternatif Sumber Energi
 2. Rekayasa Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Air Tanah (Artesis) untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat di Wilayah Pedesaan Madura
-

Pada tahun 2024 Balitbang Provinsi Jawa Timur menghasilkan sejumlah 9 (sepuluh) Policy Brief dari 9 (Sembilan) yang ditargetkan sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 3.6. Policy Brief tersebut disediakan untuk kepentingan Kepala Daerah dan instansi terkait sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

Tabel 3.6. Daftar *Policy Brief* Tahun 2024

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

1. Model Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Tanpa Konflik
2. Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif Pengembangan Pariwisata Kawasan Pesisir Selatan
3. Kreativitas Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif bagi Generasi Milenial

Bidang Sosial dan Kependudukan

4. Menuju Lumbung Pangan Berkelanjutan Yang Sukses di Jawa Timur
5. Mengatasi Limbah Mikroplastik : Strategi Perlindungan Ekosistem dan Kesehatan Masyarakat Provinsi Jawa Timur

6. Urgensi Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis

Bidang Ekonomi dan Pembangunan

7. Transformasi UMKM di Masa Depan dengan UMKM Go Digital
8. Optimalisasi Sektor Ekonomi Unggulan untuk Memperkuat Ketahanan dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur
9. Optimalisasi Program Jatim Berdaya sebagai Solusi Memperkecil Disparitas Ekonomi Perkotaan dan Pedesaan di Jawa Timur

Untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan selama tahun 2024, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur melakukan pengukuran dengan menggunakan instrumen kuesioner yang berisi uraian pertanyaan terkait pemanfaatan hasil penelitian oleh stakeholder. Kuesioner ini disebarakan ke Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Peta pemanfaatan hasil penelitian disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Peta Pemanfaatan Hasil Litbang

| NO | KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | JUMLAH HASIL LITBANG | TARGET PEMANFAATAN (Dokumen) | REALISASI PEMANFAATAN (Dokumen) | CAPAIAN (%) |
|----|--|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 1 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 9 | 9 | 9 | 100% |
| 2 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | 7 | 7 | 7 | 100% |
| 3 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 9 | 9 | 9 | 100% |
| 4 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 2 | 2 | 2 | 100% |
| | JUMLAH | 27 | 27 | 27 | 100% |

Tabel 3.7 memperlihatkan bahwa 27 kegiatan (100%) atau seluruh kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Balitbang pada tahun 2024

dimanfaatkan oleh stakeholder sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan. Keberhasilan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur dalam pencapaian IKU ini tidak lain karena dukungan ketersediaan sistem *data base* penjangkauan judul dari Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan *Focus Group Discussion* (FGD) dan Rapat Koordinasi Kelitbang sehingga kegiatan litbang yang dilakukan telah sesuai dengan kebutuhan stakeholder dan hasilnya juga lebih termanfaatkan secara optimal. Selain itu, Balitbang juga telah berupaya untuk melibatkan secara aktif stakeholder pengusul dalam pelaksanaan kegiatan litbang.

Hasil penelitian dan pengembangan adalah aset lembaga yang perlu dilindungi, karena merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang sangat bernilai. Seiring dengan arus keterbukaan informasi publik saat ini dimana perkembangan teknologi informasi maju dengan pesat, maka publikasi hasil litbang menjadi sangat penting untuk dilakukan untuk mendukung pemanfaatan hasil litbang. Publikasi merupakan aspek potensial bagi Balitbang Provinsi Jawa Timur dalam rangka menyebarluaskan hasil litbang kepada publik, hal ini sangat erat kaitannya dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja dalam hal pemanfaatan hasil kelitbang kepada stakeholder.

Salah satu upaya Balitbang untuk mempublikasikan hasil litbangnya adalah dengan menerbitkan Jurnal Litbang Kebijakan "CAKRAWALA" yang terbit secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Jurnal tersebut merupakan media ilmiah untuk mempublikasikan hasil litbang khususnya yang berupa *public policy research*. Sejak tahun 2018 Jurnal Cakrawala sudah menjadi Jurnal Cakrawala Online sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat secara umum. Pada tanggal 30 Desember 2022 Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan, telah terakreditasi Sinta Peringkat 3 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 230/E/KPT/2022, tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah periode IV Tahun 2022. Selain dipublikasikan melalui Jurnal Litbang Cakrawala, beberapa hasil litbang juga dipublikasikan melalui Jurnal Ilmiah lainnya baik yang terakreditasi nasional maupun internasional.

Pada tahun 2024, terdapat 21 hasil litbang yang telah dipublikasikan melalui 21 jurnal ilmiah, 2 (dua) buku, dan 5 (lima) *proceeding*, dan 2 (dua) pemakalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Artikel hasil litbang yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah, Buku, *Proceeding*, dan pemakalah Tahun 2024

| NO | JUDUL | PENULIS |
|----------------------|--|--|
| JURNAL ILMIAH | | |
| 1 | <p>Improving Integration of Transportation Modes for Hinterland of Prigi Commercial Port, East Java Province, Indonesia</p> <p>ToMS ~ Transactions on Maritime Science ~ Faculty of Maritime Studies ~ University of Split, https://www.toms.com.hr/index.php/toms/article/view/704/590</p> | <p>Priyambodo, Joko Sabtohadhi, Abdul Hamid, Diah Novianti, Momom, Dewi Gartika, Suroso, Herma Juniati, Rita, Dendy Setyawan, Abdul Mutholib, Win Akustia</p> |
| 2 | <p>Multi-Skilled Workers And Adewuate Environmental Infrastructure Enhance The Transmigration Program</p> <p>Journal of Sustainability Science and Management Volume 19 Number 12, December 2024 (Scopus Q3) e ISSN2672-7226 Penerbit UMT, Universiti Malaysia Terengganu, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85212002646&origin=inward&txGid=a5b28ec603a356c09958239955a87f63</p> | <p>Muh Amir, Slamet Hari Sutanto, Abdul Hamid, Sri Trisnaningsih, Harida Samudro, Sarwoko Mangkoedihardjo</p> |
| 3 | <p>Harmonizing high-risk pregnancies: A comprehensive investigation into maternal and fetal well-being</p> <p>Enpress-Publisher, Journal of Infrastructure, Policy and Development, https://doi.org/10.24294/jipd3932</p> | <p>Mangatas Silaen, Andjar Prasetyo, Dewi Gartika, Arnis Rachmadhani, Rienoviar Rienoviar, Mirna Dwirastina, Gustaria Hutapea, Alhadi Saputra, Resky Nanda Pranaka, Henny Hidayanti</p> |
| 4 | <p>Impact of Integrated Nutrient Management Based on Silicon to Morpho Physiological Changes on Maize: Enchacing Light Interception and Radiation use Efficiency</p> <p>J. Glob. Innov. Agric. Sci., 2024, 12(3): 775-786 ISSN (Online): 2788-4546; ISSN (Print):2788-4538 https://doi.org/10.22194/JGIAS/24.1346, http://www.jgiass.com/</p> | <p>Muhammad Iwan Wahyudi, Agus Suryanto, Yogi Sugito, Arifin Noor Sugiharto and Abdul Hamid</p> |
| 5 | <p>Exploring the influence of regional economic pillars on library service equity in Indonesia</p> <p>Malaysian Journal of Library & Information Science, Vol. 29 No. 2 (2024): http://mojes.um.edu.my/index.php/MJLIS/article/view/54190</p> | <p>Irwantoro</p> |
| 6 | <p>Optimizing health protocol compliance through supply chain management in Surabaya's COVID19 response</p> <p>Uncertain Supply Chain Management 13 (2025) 625–636</p> | <p>Nur Khasanah, Jaka Sriyana, Andjar Prasetyo, Abdul Hamid, Nurul Istiqomah, Momon Momon, Asep</p> |

| NO | JUDUL | PENULIS |
|----|--|---|
| | http://dx.doi.org/10.5267/j.uscm.2024.11.003 | Supriadi, Pajar Yanto, Resky Nanda Pranaka, Herrukmi Septa Rinawati |
| 7 | <p>The Role Of Work-Life Balance And Supervisor Support On Job Satisfaction: An Empirical Study In Indonesian Smes</p> <p>Journal of REseach Administration. ISSN:1539-1590 E-ISSN:2573-7104. Vol. 6 No. 1 (2024) https://www.researchgate.net/publication/387662990_THE_ROLE_OF_WORK-LIFE_BALANCE_AND_SUPERVISOR_SUPPO RT_ON_JOB_SATISFACTION_AN_EMPIRICA L_STUDY_IN_INDONESIAN_SMES</p> | Mochamad Mochklas, Subagyo Subagyo, Mochamad Muchson, Forijati Forijati, Herrukmi Septa Rinawati |
| 8 | <p>Stakeholder releatinship network in tourism development collaborative in the buffer zone of mount Bromo, Indonesia</p> <p>Nanotechnology perceptions journal volume 20 nomor 4 (2024), https://nano-ntp.com/index.php/nano/issue/view/71</p> | R Widodo Djati Sasongko , Bambang Supriyono, Sarwono, Alfi Haris Wanto |
| 9 | <p>Job Loss Guarantee for Workers Who Experience Layoffs</p> <p>International Journal of Advanced Engineering and Management Research (IJAEMR), Vol. 9, No. 05; 2024 ISSN: 2456-3676 http://dx.doi.org/10.51505/ijaemr.2024.9508</p> | Sugeng Lestari, Made Warka, Sholikhin Ruslie, Himawan Estu Bagijo |
| 10 | <p>Analysis of Workers Who Lost Jobs Due to Lay Off</p> <p>International Journal of Advanced Engineering and Management Research (IJAEMR) https://www.ijaemr.com/uploads/pdf/archivepdf/2024/IJAEMR_665.pdf</p> | Sugeng Lestari, Made Warka, Sholikhin Ruslie, Himawan Estu Bagijo |
| 11 | <p>The Effect of Maternal Child-feeding Patterns on the Incidence of Stunting among Toddlers in Jombang Regency and Pasuruan City, East Java Province</p> <p>(IJHN) (Indonesian Journal of Human Nutrition), Vol. 11 No. 1 (2024) https://doi.org/10.21776/ub.ijhn.2024.011.01.2</p> | Elya Sugianti , Berliana Devianti Putri, Henny Hidayanti |
| 12 | <p>The Role of Fathers in the Incidence of Stunting among Toddlers in Rural Areas</p> <p>Amerta Nutrition, Vol. 8 No. 2 (2024) https://doi.org/10.20473/amnt.v8i2.2024.214-221</p> | Elya Sugianti , Berliana Devianti Putri, Annas Buanasita |
| 13 | <p>Pemanfaatan BSF dalam Pengelolaan Sampah di Kawasan Permukiman Perkotaan</p> <p>Cakrawala, Volume 18, Nomer 2, 2024 https://doi.org/10.32781/cakrawala.v18i2.720</p> | Diah Novianti , Endah Rimbawati, Judiono Judiono |
| 14 | <p>Revitalisasi Makam Belanda Di Peneleh Surabaya Untuk Mendukung Urban Tourism Berdasarkan Persepsi Stakeholder</p> <p>Inovasi: Jurnal Politik dan Kebijakan Vol. 21 No. 1, Mei 2024: 27 – 37</p> | Kristian Buditiawan , Eko Budi Santoso, Siti Nurlaela |

| NO | JUDUL | PENULIS |
|-------------|--|--|
| | https://www.researchgate.net/publication/380898818_Revitalisasi_Makam_Belanda_di_Peneleh_Surabaya_untuk_Mendukung_Urban_Tourism_Berdasarkan_Persepsi_Stakeholder | |
| 15 | Application Of Organic Cultivation To Maintain The Harmony Of Nature And Food Safety Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, https://doi.org/10.14710/agrisocionomics.v8i1.21361 | Fadhilatul Laela, Ratna Dewi Judhaswati |
| 16 | Evaluasi Kesesuaian Lahan Untuk Pengembangan Tanaman Sengon Di Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam https://cakrawalajournal.org/index.php/cakrawala/article/view/663 | Yeni Trias Kurniawati, Wahyu Niken Febrianti, Glenmas Guardison Richard Wojtyla Wattie, Ratna Dewi Judhaswati , Wuryaning Handayani, Yuningsih Yuningsih, Maroeto Maroeto |
| 17 | Optimasi Komoditas Pertanian Sebagai Sektor Basis di Kabupaten Banyuwangi Economic and Education Journal (Ecoducation), Apr 2024 https://paperity.org/p/322999693/optimasi-komoditas-pertanian-sebagai-sektor-basis-di-kabupaten-banyuwangi | Kristian Buditiawan, Dendy Setyawan |
| 18 | Bridging Legal Gaps: Harmonizing the Roles of BPBD, Bakesbangpol, and Bakorwil in Regional Governance https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/4063 | Permadi Setyonagoro, Himawan Estu Bagijo, Slamet Hari Sutanto, Yudiyanto Tri Kurniawan, Sonya Claudia Siwu |
| 19 | The Duality of Administrative and Communicative Powers in Legislative Drafting Evidence from East Java (Journal of Indonesian Legal Studies (Universitas Negeri Semarang), https://journal.unnes.ac.id/journals/jils/article/view/4533/476 | Himawan Estu Bagijo, Ahmad Siboy, Sholahuddin Al-Fatih, Mohammad Affan |
| 20 | Pengaturan pengakuan keberagaman sumber hukum dalam masyarakat multikultur melalui filsafat hukum pluralisme Jurnal Magister Hukum Perspektif_Universitas Wisnuwardhana Malang) https://doi.org/10.37303/magister.v15i1.97 | Danik Puri Rahayu, Himawan Estu Bagijo |
| 21 | Dampak Hukum Atas Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat Dalam Pembentukan Perdes (Jurnal Magister Hukum Perspektif_Universitas Wisnuwardhana Malang), https://doi.org/10.37303/magister.v15i2.113 | Wibowo Tri Laksono, Rizal Achmad Affandi, Himawan Estu Bagijo |
| BUKU | | |
| 1 | East Luwu Mahalona Transmigrant Alternatives In Mitigating Poverty Impact | M. Amir. HT, Himawan Estu Bagijo, Slamet Hari Sutanto |

| NO | JUDUL | PENULIS |
|-------------------|--|--|
| | White Falcon Publishing; 1 edition (November 2024), ISBN-13: 9798892224253, https://shorturl.at/eR6UN | |
| 2 | Comprehensive Framework For Rehabilitation: Social, Legal, And Economic Perspectives In Indonesia Technium Books ISBN 978-630-95064-0-5, https://doi.org/10.47577/book12147 | Setyo Sumarno, Mu'man Nuryana, Nurhayu, Togiaratua Nainggolan, Achmadi Jayaputra, Sugiyanto, Ruaida Murni, Ery Agus Kurnianto, Himawan Estu Bagijo , Sulistyani Eka Lestari, Mohamad Miftah, Asriani, Herrukmi Septa Rinawati , Andjar Prasetyo, Andi Tenri Awaru, Husnah Rahman, Hasniati |
| PROCEEDING | | |
| 1 | Application of Liquid Organic Fertilizer and In-organic Fertilizer can Increase the Value of Relative Agronomic Effectiveness Case study: Growth and Yields Sweet Corn Crop on Inceptisols (IY_2024) https://doi.org/10.1063/5.0191214 | Nurul Istiqomah; Titiek Purbiati; Lilia Fauziah; Ita Yustina; Diding Rachmawati; Abdul Hamid |
| 2 | The Relationship between Skills, the Labor Market, and Market Size and Women's Education Borobudur International Symposium. 11 Desember 2024 | Herrukmi Septa Rinawati |
| 3 | Usia dan Berat Badan Lahir Anak Mempengaruhi Kejadian Stunting di Desa Rawan Pangan https://www.ejournal.ummuba.ac.id/index.php/S-ENABISTEKES/article/view/2202/1116 | Elya Sugianti , Annas Buanasita |
| 4 | Menggali Potensi Keberhasilan Program Transmigrasi: Pendekatan Pemetaan Karakteristik Sosial Ekonomi Calon Transmigran Asal Provinsi Jawa Timur Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi Ke-8 Politeknik STIA LAN Bandung, https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/index | Slamet Hari Sutanto |
| 5 | Daya Ikat Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara dan Urgensi Penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara Prosiding eksternal instansi https://snhrp.unipasby.ac.id/prosiding/index.php/snhrp/article/view/1171/ | Permadi Setyonagoro |
| PEMAKALAH | | |
| 1 | Village Resilience Strategy in East Java and its Impact on Economic Stability Based on Agricultural Development Acara : International Conference on Environmental Ecology of Food Security (ICEFS) Tahun 2024 | IRWANTORO, Dendy Setyawan |

| NO | JUDUL | PENULIS |
|----|---|---------------------|
| | Pelaksana: Universitas Musamus Merauke | |
| 2 | Studi Kualitatif Keberhasilan Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri Di Unit Pemukiman Transmigrasi Padauloyo, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah Dipresentasikan Dalam Seminar Nasional Interdisiplin Pascasarjana (SNIP) Ke-3 Pascasarjana Universitas Jambi 15 Oktober 2024, https://snipunja20.unja.ac.id/ | Slamet Hari Sutanto |

Selain melalui publikasi hasil kelitbangan, Balitbang juga melakukan diseminasi hasil kelitbangan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Dalam penyebaran informasi ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur menggunakan 2 (dua) metode diseminasi yaitu:

1. Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan secara langsung kepada masyarakat

Diseminasi hasil litbang secara langsung ke masyarakat dilakukan melalui Kegiatan Sosialisasi Hasil Litbang dilakukan terhadap 4 (empat) hasil litbang (Tabel 3.9).

Tabel 3.9. Sosialisasi Hasil Litbang Tahun 2024

| NO | JUDUL LITBANG | KABUPATEN/ KOTA |
|----|---|---------------------|
| 1 | Kawasan Budidaya Ikan Terintegrasi Menuju Terwujudnya Ekonomi Hijau (Green Economy) | Kabupaten Malang |
| 2 | Pemanenan Air Hujan Sebagai Alternatif Solusi Penyediaan Air | |
| 3 | Optimalisasi Potensi Daerah Melalui Pemberdayaan Daun Pandan Menjadi Komoditas Kerajinan Tangan (Handy Craft) | |
| 4 | Kesiapan Sarana Dan Prasarana Operasionalisasi Bandara Perintis Di Jawa Timur | |

2. Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan melalui media.

Publikasi merupakan aspek potensial bagi Balitbang Provinsi Jawa Timur dalam rangka menyebarkan hasil litbang kepada publik, hal ini sangat erat kaitannya dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja dalam hal

pemanfaatan hasil kelitbangan kepada stakeholder. Sehubungan dengan hal tersebut, Balitbang menggunakan Website resmi Balitbang Provinsi Jawa Timur (www.brida.jatimprov.go.id) sebagai media publikasi dan Lynbangjol (Aplikasi layanan hasil kelitbangan jalur online).

Website BALITBANG merupakan media digitalisasi hasil litbang agar segera diketahui oleh publik sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh Balitbang Provinsi Jawa Timur. Melalui website ini, seluruh hasil litbang yang telah dilakukan oleh BALITBANG diupload secara berkala sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas.

Untuk menghargai hasil kelitbangan, Balitbang Provinsi Jawa Timur juga memberikan fasilitasi dan pendampingan dalam pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hasil kelitbangan dan Inovasi. Balitbang melalui inovasinya, yakni aplikasi E-Nikibang (E-Klinik Hak Kekayaan Intelektual Balitbang) memberikan kemudahan bagi inovator baik di Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten/ Kota untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual hasil inovasinya.

Pada tahun 2024, terdapat 6 (enam) usulan HKI yang telah difasilitasi oleh Balitbang dari 10 yang ditargetkan. Hal ini disebabkan Kabupaten/Kota juga telah banyak yang mempunyai kegiatan fasilitasi HKI sehingga pendaftaran HKI tidak lagi melalui Provinsi. Adapun 6 (enam) HKI tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10. Daftar Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Tahun 2024

| No | USULAN DARI | JUDUL USULAN HKI | SERTIFIKAT HKI |
|----|-----------------------|--|----------------|
| 1 | Balitbang Prov. Jatim | Sistem Informasi Pengolahan Data Penyakit Daha Husada (Si-PANDAKITA) | Hak Cipta |
| 2 | Balitbang Prov. Jatim | Sistem Informasi Daily And Weekly Operational Report (Si-DWOR) | Hak Cipta |
| 3 | Balitbang Prov. Jatim | Sistem Informasi Dan Monitoring Manajemen Mutu (Si IMMUT) | Hak Cipta |
| 4 | Balitbang Prov. Jatim | Posyandu Mobile | Hak Cipta |
| 5 | Balitbang Prov. Jatim | Pelayanan Perizinan Siap Jemput Siap Antar (SIPUT SITAR) | Hak Cipta |
| 6 | Balitbang Prov. Jatim | Akurasi Data Kependudukan (KURSI TANDU) | Hak Cipta |

SASARAN II: Meningkatnya Kuantitas Inovasi Daerah

Inovasi Daerah yang diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya. Inovasi daerah tersebut meliputi inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi pelayanan publik; dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing. Dalam rangka untuk lebih meningkatkan daya saing daerah, pada tahun 2019-2024, Jawa Timur akan fokus untuk menggali dan mengembangkan inovasi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah. Untuk itu, pengukuran dilakukan dengan menghitung jumlah inovasi daerah yang dikembangkan.

Indikator Kinerja Utama untuk mengukur sasaran "Meningkatnya kuantitas inovasi daerah" adalah jumlah inovasi yang ditetapkan menjadi inovasi daerah. Untuk mencapai Sasaran II, Balitbang Provinsi Jawa Timur mengadakan fasilitasi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan inovasi di Provinsi Jawa Timur.

Capaian Indikator Kinerja Utama sebagai alat pengukur keberhasilan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan provinsi Jawa Timur terhadap Sasaran II disajikan dalam Tabel 3.11.

Tabel 3.11. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran II

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2024 | REALISASI | | CAPAIAN 2024 (%) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | |
| Meningkatnya kualitas inovasi daerah | Meningkatnya kuantitas inovasi daerah | Jumlah Inovasi yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah | 30 | 189 | 220 | 733,33 % (SANGAT BAIK) |

Melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (27 Desember 2021), Balitbang memberikan acuan dalam penyelenggaraan inovasi daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mulai dari bentuk dan kriteria inovasi daerah, pengusulan inisiatif, penilaian, perlindungan, penyebaran, monitoring dan evaluasi, hingga pembinaan dan pengawasan inovasi daerah. Penguatan kebijakan penyelenggaraan Inovasi Daerah diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan pemberdayaan potensi sumber daya daerah, serta peningkatan daya saing daerah. Selanjutnya, inovasi daerah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/805/KPTS/013/2024 tentang Penerapan Inovasi Daerah di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2024-2025. Adanya ketentuan yang mengatur penerapan/pengimplementasian inovasi daerah Provinsi Jawa Timur, memungkinkan kegiatan inovasi daerah dapat masuk menjadi bagian dari perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Pada tahun 2024, terdapat sejumlah 220 inovasi daerah yang dilaporkan oleh 34 Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Inovasi ini mempunyai bentuk yang beranekaragam baik itu inovasi tata kelola pemerintahan inovasi pelayanan publik, maupun Inovasi lainnya. Profil inovasi daerah ini yang menghantarkan Provinsi Jawa Timur untuk memperoleh penghargaan Provinsi Terinovatif dari Kementerian Dalam Negeri melalui ajang *Innovative Government Award* Tahun 2024.

SASARAN III: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh pengguna anggaran negara/daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis. Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk:

- Merencanakan kinerja dan target kinerja;
- Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan;
- Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan; serta

- Telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Indikator Kinerja Utama untuk mengukur sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" adalah jumlah inovasi yang ditetapkan menjadi inovasi daerah. Untuk mencapai Sasaran III, Balitbang Provinsi Jawa Timur terus berupaya dalam penyempurnaan manajemen dan pelaporan kinerja melalui penguatan kebijakan sistem pengawasan internal dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Peningkatan implementasi SAKIP diawali dengan perbaikan mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Perencanaan

Melakukan penyelarasan target kinerja terhadap dokumen perencanaan. Penyusunan perencanaan kinerja dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen di Balitbang Provinsi Jawa Timur.

Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja

Balitbang secara rutin melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja baik secara individu (setiap bulan melalui SKP) dan secara instansi (setiap tiga bulan melalui aplikasi Si-Cakab). Data kinerja yang diperoleh selanjutnya dianalisis dan dibahas secara bersama untuk memetakan hambatan/kendala yang dihadapi untuk memudahkan dalam menentukan solusi. Hasil evaluasi dipergunakan sebagai umpan balik penentuan kebijakan lebih lanjut dalam peningkatan kinerja selanjutnya.

Capaian Indikator Kinerja Utama sebagai alat pengukur keberhasilan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan provinsi Jawa Timur terhadap Sasaran III disajikan dalam Tabel 3.12.

Tabel 3.12. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran III

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2024 | REALISASI | | CAPAIAN 2024 (%) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|-------|---------------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | |
| Meningkatnya kualitas inovasi daerah | Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah | Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah | 84,00 | 83,71 | 84,49 | 100,58 % (BAIK) |

Hasil evaluasi tahun 2024 menunjukkan bahwa, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur memperoleh nilai **84,49** atau **Predikat A**. Hal ini menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan

dengan capaian kinerjanya memadai serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi serta penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil telah menunjukkan hasil yang memuaskan.

2. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya sekaligus sebagai upaya mengoptimalkan kinerja BALITBANG Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, maka dipandang perlu untuk melakukan perbandingan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir. Transformasi perubahan sekaligus analisis perbandingan target, realisasi, dan capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir diperlihatkan dalam Tabel 3.13.

Tabel 3.13. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja 6 (enam) Tahun Terakhir (Tahun 2019-2024)

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TAHUN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|-----------|----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan | Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan oleh OPD Provinsi (%) | 45 % | 89.13 % | 198.07 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan oleh Kab/Kota (%) | 30 % | 89.13 % | 297.10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang didiseminasikan (%) | 40 % | 100.00 % | 250.00 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mengembangkan Sistem Inovasi Daerah Jawa Timur | Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah Jawa Timur | Persentase OPD Provinsi yang memiliki kegiatan mendukung Sistem Inovasi Daerah Jawa Timur (%) | 13 % | 13.43 % | 103.33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kegiatan mendukung Sistem Inovasi Daerah Jawa Timur (%) | 36 % | 42.11 % | 116.96 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TAHUN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|-----------|----------|---------|-----------|----------|--------|-----------|----------|---------|-----------|----------|---------|-----------|----------|--------|-----------|----------|
| | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| | | | Tar get | Realisasi | Capaian | Tar get | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Tar get | Realisasi | Capaian | Tar get | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Meningkatnya pendayagunaan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan | Meningkatnya a hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan (%) | - | - | - | 75 % | 100.00 % | 133.33 % | 100% | 75% | 133,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meningkatnya kualitas inovasi daerah | Meningkatnya a hasil kelitbangan yang berkualitas | Jumlah policy brief berbasis hasil kelitbangan (Dokumen) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 122,22 % | 9 | 10 | 111,11 % | 9 | 9 | 100,00 % |
| | | Jumlah hasil kelitbangan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah (Dokumen) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 100% | 10 | 14 | 140% | 10 | 21 | 210% |
| | Meningkatnya a kuantitas inovasi daerah | Jumlah inovasi daerah (Inovasi) | - | - | - | 2 | 4 | 200.00 % | 3 | 3 | 100.00 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Jumlah inovasi yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (Inovasi) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 204 | 680% | 30 | 189 | 680% | 30 | 220 | 733,33 % |
| | Meningkatnya a nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah | Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah | 81, 15 | 82,35 | 101,48 % | 81, 15 | 82,36 | 101,49 % | 83,38 | 82,37 | 101,22 % | 83,6 0 | 83,46 | 99,83% | 83,8 0 | 83,71 | 99,89% | 84,00 | 84,49 | 100,58 % |

Selain itu, dilakukan panyandingan juga terhadap perolehan Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur terhadap Provinsi lainnya dalam 4 (empat) tahun terakhir untuk melihat perkembangan inovasi daerah di Jawa Timur dibandingkan dengan Provinsi lainnya, sebagaimana dapat dilihat pada table 3.14.

Tabel 3.14. Analisa Perbandingan Indeks Inovasi Daerah dalam 4 (empat) Tahun Terakhir dalam Lingkup Nasional

| Perolehan Nilai Indeks Inovasi Daerah pada 10 Provinsi Teratas | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Sumsel: 79,51 | 1. Sumsel: 79,47 | 1. Sumsel: 83,28 | 1. Sumbar: 88,92 |
| 2. NTB: 75,67 | 2. Jatim: 72,82 | 2. DKI Jakarta: 80,98 | 2. Jatim: 87,23 |
| 3. Jatim: 63, 15 | 3. Jateng: 71,32 | 3. NTB: 75,37 | 3. Jabar: 81,27 |
| 4. Jabar: 62,82 | 4. Sumbar: 70,49 | 4. Jabar: 74,77 | 4. DKI Jakarta: 80,18 |
| 5. Jateng: 62,57 | 5. Jabar: 69,15 | 5. Sumbar: 71,99 | 5. Sumsel: 75,79 |
| 6. Sumbar: 61,13 | 6. NTB: 68,51 | 6. Jatim: 71,38 | 6. Jateng: 72,85 |
| 7. Jambi: 61,03 | 7. Bali: 64,37 | 7. Bali: 67,44 | 7. Bali: 69,92 |
| 8. Banten: 60,52 | 8. Lampung: 60,90 | 8. Jateng: 65,40 | 8. Lampung: 65,50 |
| 9. DKI Jakarta: 58,68 | 9. DKI Jakarta: 60,51 | 9. NTT: 62,53 | 9. NTB: 63,40 |
| 10. Bengkulu: 57,93 | 10. NTT 59, 76 | 10. Lampung: | 10. Kaltim: 61,74 |

Pada tahun 2024, perolehan Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan dari 71,38 menjadi 87,23 dalam rentang kategori Sangat Inovatif. Kenaikan yang sangat signifikan ini disebabkan adanya peningkatan jumlah inovasi yang dihasilkan dan nilai kematangan inovasi daerah. Nilai kematangan inovasi itu sendiri adalah keterisian indikator Satuan Inovasi Daerah (SID) yang berisikan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga keberlanjutan suatu inovasi. Jika setiap indikator dapat mencapai parameter 3, maka nilai kematangan inovasi juga akan tinggi.

3. Capaian Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (RPJMD)

Pencapaian Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan Tujuan, Sasaran, serta Indikator Kinerja Utama pada tahun 2024 terhadap target sampai dengan akhir periode RPJMD 2019-2024 disajikan Tabel 3.15.

Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET s.d AKHIR RPJMD (TH. 2024) | REALISASI s.d TAHUN 2024 | TINGKAT KEMAJUAN |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| Meningkatnya hasil kelitbangan yang berkualitas | Jumlah policy brief berbasis hasil kelitbangan (Dokumen) | 27 | 29 | 107,41% |
| | Jumlah hasil kelitbangan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah (Dokumen) | 30 | 45 | 150% |
| Meningkatnya kuantitas inovasi daerah | Jumlah inovasi yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (inovasi) | 90 | 613 | 681,11% |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah | 82,4 | 84,49 | 102,54% |

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Sasaran I, target indikator kinerja jumlah *policy brief* berbasis hasil kelitbangan dan jumlah hasil kelitbangan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah telah tercapai dan bahkan melebihi dari target yang diharapkan pada tahun 2024. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan tercapainya target indikator kinerja, yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan telah dilakukan sesuai dengan tahapan dan jadwal perencanaan dan penganggaran
2. Komitmen analis kebijakan, peneliti, perekayasa, beserta pejabat struktural untuk melaksanakan kegiatan kelitbangan sesuai dengan target yang telah ditentukan
3. Melakukan koordinasi dan diskusi intensif dengan PD Provinsi dan Kab/Kota terkait dengan kegiatan litbang yang dibutuhkan

Sasaran II, target indikator jumlah inovasi yang ditetapkan menjadi inovasi daerah digunakan untuk mendorong dan memotivasi munculnya inovasi daerah di

Provinsi Jawa Timur. Beberapa faktor yang menyebabkan tercapainya target indikator tersebut adalah:

1. Adanya kolaborasi dan fasilitasi *quadruple helix* (pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat) untuk membangun sinergi berkelanjutan dalam menjembatani ide-ide inovatif
2. Pengembangan budaya/kultur iptek dan inovasi melalui pendekatan multi sektor, pendidikan, dukungan teknologi dan informasi, adanya kompetisi dan penghargaan, serta penguatan ekosistem sistem inovasi daerah.

Sasaran III, indikator nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

Target nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah 84,00 telah tercapai dengan nilai 84,49. Tingkat pencapaian untuk indikator nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebesar 100,58%.

Walaupun secara umum capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 telah memperoleh hasil yang memuaskan, namun masih terdapat beberapa permasalahan untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan capaian indikator kinerjanya. Beberapa permasalahan yang dihadapi pada pencapaian masing-masing sasaran antara lain:

- **Sasaran I "Meningkatnya hasil kelitbangan yang berkualitas"**

1. Adanya kendala dalam penyusunan policy brief yang berkualitas mengingat jabatan fungsional analis kebijakan masih relatif baru di Balitbang
2. Dalam hal tertentu, masih ada ego sektoral perangkat daerah lain yang menyebabkan kurang optimalnya koordinasi dan kerjasama selama melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan
3. Pada beberapa perangkat daerah lokasi penelitian dan pengembangan, terdapat pemikiran negatif kekhawatiran terpublikasikannya masalah yang ada di suatu daerah, sehingga data yang diperoleh kurang mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

- **Sasaran II "Meningkatnya kuantitas inovasi daerah"**

1. Masih lemahnya implementasi dan pengembangan kebijakan yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan inovasi daerah

2. Kurang bersinerginya lembaga, institusi, dan masyarakat dalam mengembangkan inovasi daerah

- Sasaran III **"Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah"**

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Akuntabilitas Kinerja;
2. Masih terdapat ketidaksinkronan pada dokumen perencanaan;
3. Mekanisme pengumpulan data kinerja masih bersifat manual dan kurang optimalnya pelaksanaan evaluasi internal.

Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sebagaimana disebutkan diatas, maka langkah-langkah yang dapat diambil adalah:

- Sasaran I **"Meningkatnya hasil kelitbangan yang berkualitas"**

1. Meningkatkan kompetensi SDM analis kebijakan di lingkungan Balitbang Provinsi Jawa Timur melalui bimbingan teknis penyusunan *policy brief* secara intensif.
2. Selalu menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder dari tahap perencanaan dalam penentuan tema litbang dan selama pelaksanaan dan monev kegiatan litbang dalam rangka menjamin pemanfaatan hasil litbang
3. Melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman tujuan kegiatan litbang yang dilakukan pada daerah tersebut adalah dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

- Sasaran II **"Meningkatnya kuantitas inovasi daerah "**

1. Melakukan pemetaan lanjutan atas inovasi daerah di Provinsi Jawa Timur dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya yang ada.
2. Melakukan pendampingan, sosialisasi, serta pemberian arahan dan motivasi secara simultan dari pemerintah pusat (Provinsi) ke daerah (Kabupaten/Kota) untuk meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah, akademisi, swasta dan masyarakat dalam pengembangan inovasi daerah.

- Sasaran III **"Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah"**

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola akuntabilitas kinerja melalui penyelenggaraan bimbingan teknis terkait;
2. Melakukan penyelarasan Perjanjian Kinerja dengan Dokumen Perencanaan; dan

3. Optimalisasi mekanisme evaluasi internal, dengan penerapan evaluasi kinerja internal secara berkala melalui pemanfaatan teknologi informasi.

B. Realisasi Anggaran

Tata laksana pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Salah satu unsur tata laksana pemerintahan yang baik dan wajib untuk diberlakukan adalah adanya transparansi. Transparansi dapat dikatakan sebagai suatu komitmen untuk mengungkapkan secara jujur, terbuka dan komprehensif tentang informasi yang dibutuhkan oleh publik, baik secara kinerja maupun keuangan.

Salah satu upaya pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat dan juga untuk mewujudkan tercapainya *good governance* adalah dengan menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam segala tindakan Penyelenggara Negara. Salah satu caranya adalah dengan mempublikasikan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Publikasi laporan keuangan menjadi sangat penting mengingat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, setiap instansi pemerintah tidak akan terlepas dari aspek penganggaran itu sendiri.

Pengalokasian dana yang dimiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur untuk pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2024 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 31.903.844.000,00. Namun pada PAPBD terdapat kebijakan efisiensi anggaran pada belanja pegawai dan tambahan kegiatan berskala nasional maka anggaran Balitbang bertambah menjadi sebesar Rp. 32.111.405.584,00. Dari anggaran tersebut, sejumlah Rp. 3.200.000.000,00 digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Balitbang.

Akuntabilitas keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur yang termanifestasi dalam realisasi anggaran selama periode 2024 dijelaskan pada Tabel 3.16. Secara keseluruhan, realisasi keuangan organisasi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. **29.773.410.454,00** dengan kata lain besarnya capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur adalah 92,72% (**BAIK**).

Tabel 3.16. Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2024

| NO | PROGRAM | ANGGARAN AWAL | ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|----|---|----------------|----------------------------|----------------|-------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 29.103.844.000 | 28.911.405.584 | 26.656.302.431 | 92,20% |
| 2. | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 2.800.000.000 | 3.200.000.000 | 3.117.108.023 | 97,41% |
| | J u m l a h | 31.903.844.000 | 32.111.405.584 | 29.773.410.454 | 92,72% |

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan adanya pengukuran, analisis dan evaluasi terhadap data yang berkaitan dengan kinerja, pemerintah dapat segera menentukan berbagai cara untuk mempertahankan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dan sekaligus memberikan informasi obyektif kepada publik mengenai pencapaian hasil yang diperoleh. Hasil capaian kinerja dan penggunaan anggaran menunjukkan nilai efisiensi sebesar (NE) < 90% yaitu 58,14 yang mana dapat diartikan bahwa kinerja Balitbang masuk dalam kategori **Cukup Efisien**.

Tabel 3.17. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja dan Penganggaran

| SASARAN/ PROGRAM | INDIKATOR | Capaian Kinerja (%) | Capaian Anggaran (%) | E |
|--|--|---------------------------|----------------------------|--|
| SASARAN 1 | Jumlah policy brief berbasis kelitbangan (Dokumen) | 100,00% | 97,41% | 23,06 (NE = 58, 14, maka kinerja Balitbang dinilai sudah cukup efisien) |
| Meningkatnya hasil kelitbangan yang berkualitas | | | | |
| KEGIATAN | | | | |
| 1.Litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | | |
| 2.Litbang Bidang Sosial dan Kependudukan | Jumlah hasil kelitbangan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah (Dokumen) | 210,00% | | |
| 3.Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | | | |
| SASARAN 2 | | 733,33% | 91,44% | |

| SASARAN/ PROGRAM | INDIKATOR | Capaian Kinerja (%) | Capaian Anggaran (%) | E |
|--|---|---------------------------|----------------------------|---|
| Meningkatnya kuantitas inovasi daerah | Jumlah inovasi yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (Inovasi) | | | |
| KEGIATAN | | | | |
| Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | | |
| SASARAN 3 | Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah | 100,58% | 92,20% | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| KEGIATAN | | | | |
| 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | |
| 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | |
| 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | |
| 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | |
| 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |

Dari total anggaran yang dimiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 32.111.405.584,00 teralokasi sebesar Rp. 3.200.000.000,00 atau 9,97% untuk mendukung pelaksanaan Program Kegiatan Balitbang. Pengalokasian anggaran di masing-masing sasaran pembangunan disajikan pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | ANGGARAN | % ANGGARAN |
|--------------------------------------|---|--|----------------|------------|
| Meningkatnya kualitas inovasi daerah | Meningkatnya hasil kelitbangan yang berkualitas | Jumlah policy brief berbasis hasil kelitbangan (Dokumen) | 2.611.986.000 | 8,13 |
| | | Jumlah hasil kelitbangan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah (Dokumen) | | |
| | Meningkatnya kuantitas inovasi daerah | Jumlah inovasi yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (inovasi) | 588.014.000 | 1,83 |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah | 28.911.405.584 | 90,03 |

Pada tahun 2023, Balitbang Provinsi Jawa Timur memanifestasikan Program Kegiatan Pembangunan ke dalam 2 (dua) Rumusan Sasaran (Tabel 3.19), yaitu:

- **Sasaran 1** “Meningkatnya hasil kelitbangan yang berkualitas”, didukung oleh 3 (tiga) Kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Bidang Sosial dan Kependudukan, serta Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- **Sasaran 2** “Meningkatnya Kuantitas Inovasi Daerah” didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yaitu Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
- **Sasaran 3** “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” didukung oleh 7 (tujuh) Kegiatan yaitu:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Secara umum tingkat pencapaian Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur di Tahun 2024 baik secara kinerja maupun realisasi anggaran di masing-masing sasaran dapat dikatakan **BAIK**.

Tabel 3.19. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

| SASARAN/ PROGRAM | INDIKATOR | KINERJA | | | ANGGARAN | | |
|---|---|---------|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Alokasi | Realisasi | Capaian (%) |
| SASARAN 1 Meningkatnya hasil kelitbangan yang berkualitas KEGIATAN 1. Litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 2. Litbang Bidang Sosial dan Kependudukan 3.Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Jumlah policy brief berbasis hasil kelitbangan (Dokumen) | 9 | 9 | 100,00 % | 2.611.986.000 | 2..579.431.645 | 98,75% |
| | Jumlah hasil kelitbangan yang dipubli-kasikan dalam jurnal ilmiah (Dokumen) | 10 | 21 | 210,00% | | | |
| SASARAN 2 Meningkatnya kuantitas inovasi daerah KEGIATAN Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Jumlah inovasi yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (inovasi) | 30 | 220 | 733,33% | 588.014.000 | 537.676.378 | 91,44% |
| SASARAN 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah KEGIATAN 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah | 84,00 | 84,49 | 100,58% | 28.911.405.584 | 26.656.302.431 | 92,20% |

C. Capaian Kinerja Lainnya

1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Balitbang diberikan amanat untuk mengkoordinasi dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, Balitbang mengkoordinasi dalam penginputan data pengelolaan daerah Provinsi untuk keperluan IPKD Provinsi Jawa Timur dan melakukan pengukuran untuk IPKD Kabupaten/Kota.

IPKD merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap 6 (enam) dimensi, yaitu: kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; transparansi pengelolaan keuangan daerah; penyerapan anggaran; kondisi keuangan daerah; dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Adapun capaian nilai IPKD Provinsi Jawa Timur dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20. Nilai IPKD dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir

| | Tahun | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Nilai IPKD Prov. Jatim | 64,94 (Perlu Perbaikan) | 86,195 (Baik) | 82,212 (Perlu Perbaikan) |

Pada tahun 2024, terdapat penurunan kembali nilai IPKD Provinsi Jawa Timur, hal ini disebabkan oleh penurunan nilai pada dimensi 1 yaitu tidak konsistennya dokumen perencanaan terutama pada penganggarnya. Untuk itu, perlu adanya peningkatan konsistensi nomenklatur program dan pagu antara dokumen perencanaan dan dokumen anggaran. Selain itu juga terdapat penurunan pada nilai dimensi 5, sehingga perlu adanya peningkatan kemampuan keuangan atau kemandirian daerah dengan meningkatkan PAD yang tidak bergantung pada transfer pusat, serta juga menekan belanja pegawai agar tidak menjadi beban APBD yang paling besar.

2. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK).

IKK merupakan instrumen untuk mengukur sejauh mana efektivitas dan kualitas kebijakan yang telah dibuat dan diberlakukan selama kurun waktu 3

tahun terakhir. Tujuan IKK adalah mendorong penguatan partisipasi publik dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik, khususnya dalam membangun kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy di seluruh instansi pemerintah.

Nilai IKK yang tinggi/baik idealnya merupakan representasi kualitas kebijakan yang baik pula, dan kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu menjawab segala permasalahan yang ada dan memberi manfaat yang nyata kepada masyarakat atau stakeholdernya. Pada akhirnya kebijakan yang berkualitas merupakan manifestasi kesuksesan dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.

Penilaian IKK sudah dilakukan sejak tahun 2021, namun pada tahun 2021 dan 2023 Provinsi Jawa Timur masih belum mengikuti. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/245/KPTS/013/2024 tentang Tim Kerja Penilaian Mandiri IKK Pemprov Jawa Timur Tahun 2024, Balitbang juga menjadi Ketua Tim dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). Dari hasil penilaian Lembaga Administrasi Negara (LAN), nilai IKK Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21. Nilai IKK dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir

| | Tahun | | |
|-----------|-------|------|--------------|
| | 2021 | 2023 | 2024 |
| Nilai IKK | -- | -- | 78,60 (Baik) |

3. Inovasi

Inovasi Balitbang pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Dolan Deso

Dolan Deso merupakan sebuah media promosi pariwisata, mengambil nama seperti akun wisata/influencer dan memakai konteks bahasa lokal. Nama inovasi menggambarkan filosofi yang jelas yaitu ajakan untuk berkeliling desa. Dolan deso diharapkan dapat memberi kemudahan bagi wisatawan untuk mendapatkan informasi terkait pariwisata di Jawa Timur.

Dibuatnya aplikasi Dolan Deso dilatarbelakangi antara lain karena wisatawan masih mengharapkan pemandangan sebagai atraksi utama desa wisata; sumber utama wisatawan dalam mencari informasi wisata adalah melalui sosial media; dan desa wisata masih kurang dalam merespon tren promosi berbasis digital.

Dolan Deso berbasis multiplatform yaitu Youtube (https://www.youtube.com/@DolanDeso_/featured), Website (<https://www.dolan-deso.com/#>), Instagram (<https://www.instagram.com/dolan.desoo>), Twitter, TikTok, dan Facebook.

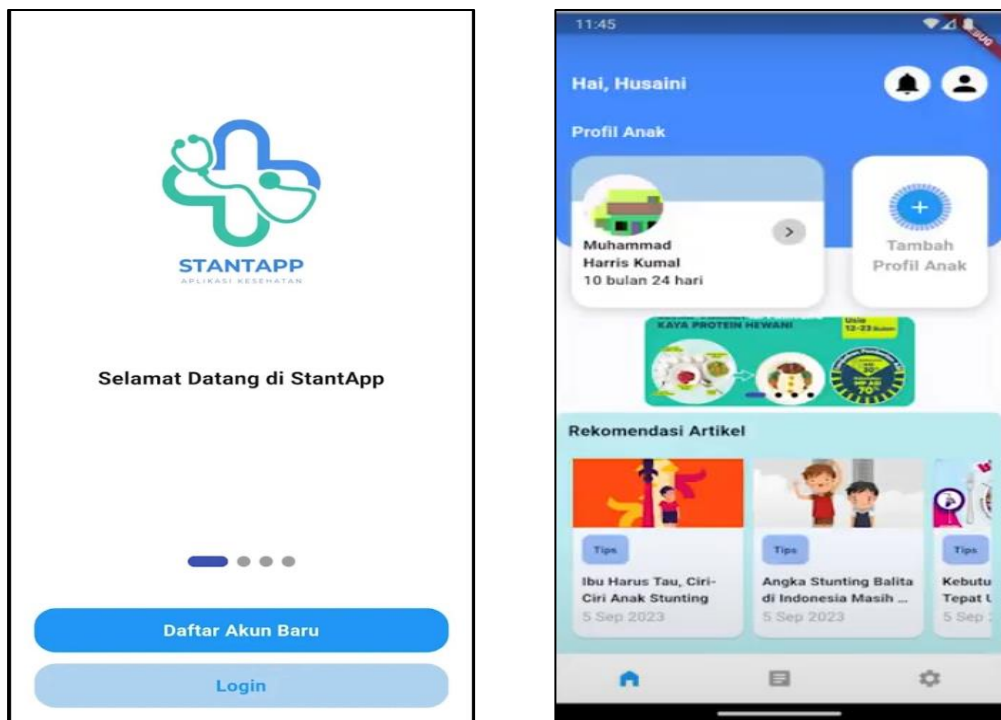


Gambar 3.3. Infografis Dolan Deso

b. Aplikasi Stunting (Stantapp)

Aplikasi Stunting Aps adalah aplikasi yang ditujukan kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang memiliki bayi dan balita hingga usia 5 tahun. Stuntapp hadir sebagai aplikasi mobile/media digital untuk dapat membantu pemahaman ibu tentang pemenuhan kebutuhan gizi balita, termasuk edukasi tentang stunting dan memberikan informasi tentang pemenuhan kebutuhan gizi balita yang berguna bagi masyarakat untuk bersama-sama mengatasi stunting.

Fitur-fitur unggulan dari aplikasi ini meliputi data informasi penting (nama orang tua, data anak, rekomendasi artikel kesehatan dan video edukasi kesehatan); monitor pertumbuhan anak, status vaksinasi, dan jadwal vaksin anak; fitur kader kesehatan yang dapat memonitor secara berkala riwayat pertumbuhan dan status gizi balita di daerah masing-masing; dan fitur pemberitahuan/notifikasi secara otomatis mengenai status gizi anak, riwayat pertumbuhan anak, dan jadwal vaksinasi anak, fitur ini penting untuk memantau tumbuh kembang anak.

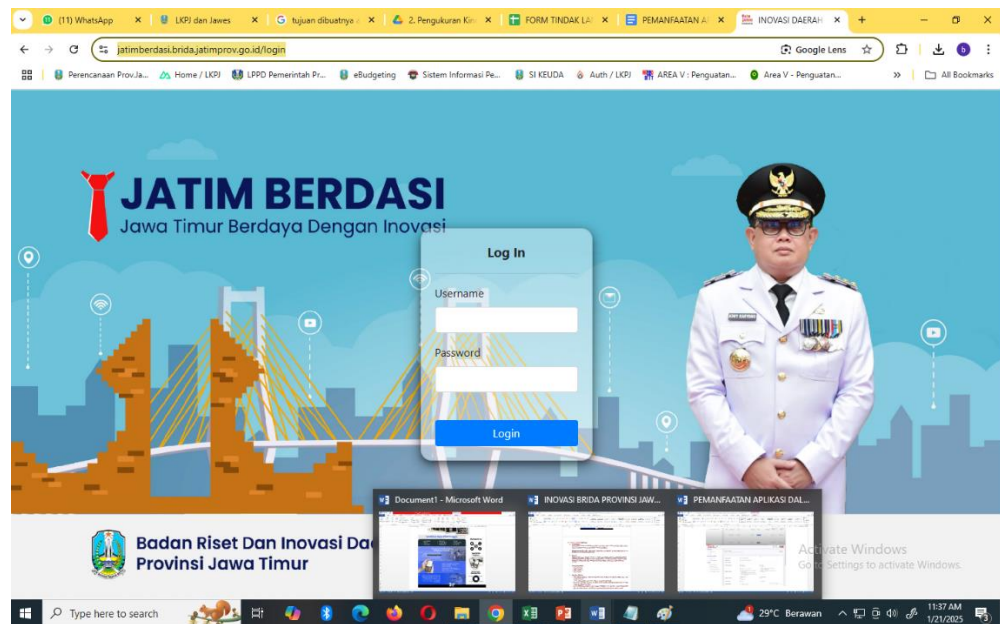


Gambar 3.4. Foto Tangkapan Layar Aplikasi Stunting

c. Jatim Berdasi

Aplikasi Jatim Berdasi (Jawa Timur Berdaya dengan Inovasi) adalah aplikasi sistem pendaftaran dan kelengkapan administrasi untuk mempermudah seleksi penilaian serta menjaga akurasi hasil inovasi, sehingga tidak ada lagi berkas yang dikirim secara manual dalam ajang Inotek Award. Aplikasi jatim berdasi untuk

kemudahan pelaksanaan inotek award dan persiapan dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah. Laman Jatim berdasi dapat diakses melalui tautan: <https://jatimberdasi.brida.jatimprov.go.id/login>.



Gambar 3.5. Foto Tangkapan Layar Aplikasi Jatim Berdasi

4. Penghargaan

Pada tahun 2024, Balitbang Provinsi Jawa Timur berhasil menghantarkan Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan Penghargaan Provinsi Terinovatif I dalam ajang *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2024. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk kepada Pj Gubernur Jawa Timur pada tanggal 5 Desember 2024 di Mercure Surabaya Grand Mirama Hotel Surabaya, mengingat Jawa Timur menjadi Tuan Rumah dalam kegiatan Penganugerahan *Innovative Government Award* Tahun 2024.

Capaian nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 adalah 87,23 yang merupakan Indeks Inovasi Daerah tertinggi di Klaster Provinsi Regional Wilayah II. Jumlah inovasi daerah yang dikirimkan adalah sebanyak 220 inovasi daerah dengan rata-rata nilai kematangan diatas 90.



Gambar 3.6. Foto Penghargaan IGA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi menuju *good governance* dengan mengacu pada Perubahan Renstra Balitbang Tahun 2019-2024. Laporan akuntabilitas ini merupakan alat ukur untuk mengetahui seberapa besar tingkat pencapaian kinerja yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan selama Tahun 2024 terkait efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga diharapkan dapat dijadikan evaluasi agar pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun mendatang dapat semakin baik.

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, sebagai Instansi yang bertugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang kelitbangan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 yang secara umum telah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Secara kumulatif, **Capaian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 terhadap Tujuan “Meningkatnya kualitas inovasi daerah” adalah 285,98% (SANGAT BAIK)**. Capaian ini diukur melalui 3 (tiga) Sasaran dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

Tabel 4.1. Capaian Kinerja Balitbang Tahun 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2024 | REALISASI 2024 | CAPAIAN 2024 (%) |
|----|---|--|-------------|----------------|---------------------------------|
| 1 | Meningkatnya hasil kelitbangan yang berkualitas | Jumlah policy brief berbasis hasil kelitbangan (Dokumen) | 9 | 9 | 100,00% (SANGAT BAIK) |
| | | Jumlah hasil kelitbangan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah (Dokumen) | 10 | 21 | 210% (SANGAT BAIK) |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2024 | REALISASI 2024 | CAPAIAN 2024 (%) |
|----|---|---|-------------|----------------|---------------------------------|
| 2 | Meningkatnya kuantitas inovasi daerah | Jumlah inovasi yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (inovasi) | 30 | 220 | 733,33% (SANGAT BAIK) |
| 3 | Meningkatnya nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah | Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah | 84,00 | 84,49 | 100,58% (SANGAT BAIK) |

Secara keseluruhan, hasil evaluasi dan analisis pencapaian kinerja yang telah dilakukan terhadap 4 (empat) Indikator Kinerja Utama telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Namun, Balitbang Provinsi Jawa Timur dirasa masih perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut untuk lebih meningkatkan kinerjanya, yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi SDM analis kebijakan di lingkungan Balitbang Provinsi Jawa Timur melalui bimbingan teknis penyusunan policy brief untuk meningkatkan kualitas policy brief.
2. Selalu menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder dari tahap perencanaan dalam penentuan tema litbang dan selama pelaksanaan dan monev kegiatan litbang dalam rangka menjamin pemanfaatan hasil litbang
3. Melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman tujuan kegiatan litbang yang dilakukan pada daerah tersebut adalah dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada
4. Melakukan pemetaan lanjutan atas inovasi daerah di Provinsi Jawa Timur dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya yang ada.
5. Melakukan pendampingan, sosialisasi, serta pemberian arahan dan motivasi secara simultan dari pemerintah pusat (Provinsi) ke daerah (Kabupaten/Kota) untuk meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah, akademisi, swasta dan masyarakat dalam pengembangan inovasi daerah.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. ANDRIYANTO, SH, M.Kes

Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADHY KARYONO

Jabatan : Pj. Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, November 2024

Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR



ADHY KARYONO

Pihak Pertama,
**KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



Dr. ANDRIYANTO, SH, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19660609 199001 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Perspektif |
|----|---|--|--------|---------------------------------|
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | 1 Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah | 84,00 | Penguatan Internal dan Anggaran |
| 2 | Meningkatnya hasil kelitbangan yang berkualitas | 1 Jumlah policy brief berbasis hasil kelitbangan | 9 | Penerima Layanan |
| | | 2 Jumlah hasil kelitbangan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah | 10 | Penerima Layanan |
| 3 | Meningkatnya kuantitas inovasi daerah | 1 Jumlah Inovasi yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah | 30 | Proses Bisnis |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|---|-----------------------|------------|
| 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Rp. 28.911.405.584,00 | P-APBD |
| 2 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Rp. 3.200.000.000,00 | P-APBD |
| Jumlah | Rp. 32.111.405.584,00 | |


Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR



ADHY KARYONO

Surabaya, November 2024

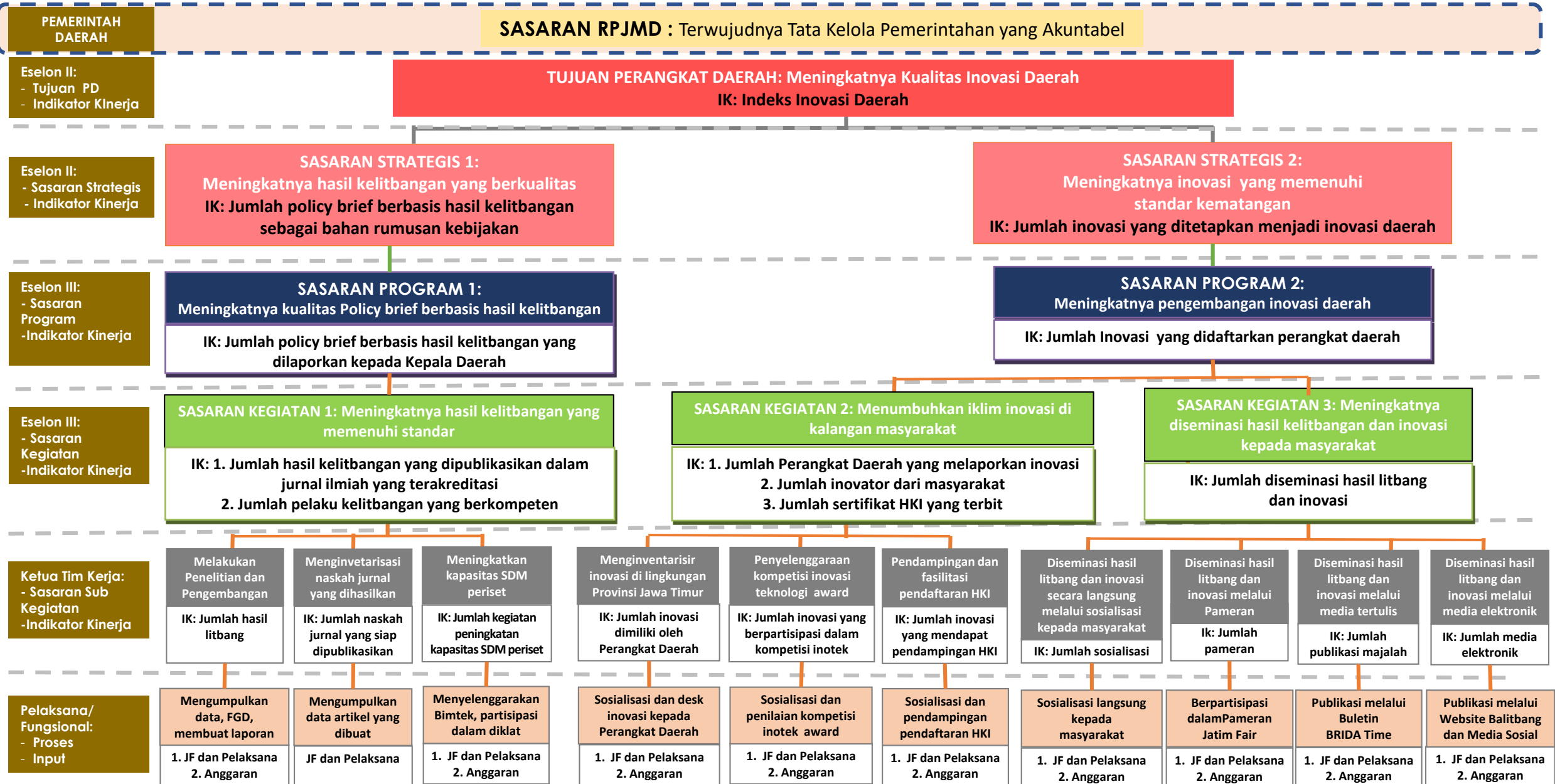
Pihak Pertama,
**KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



Dr. ANDRIYANTO, SH, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19660609 199001 1 001

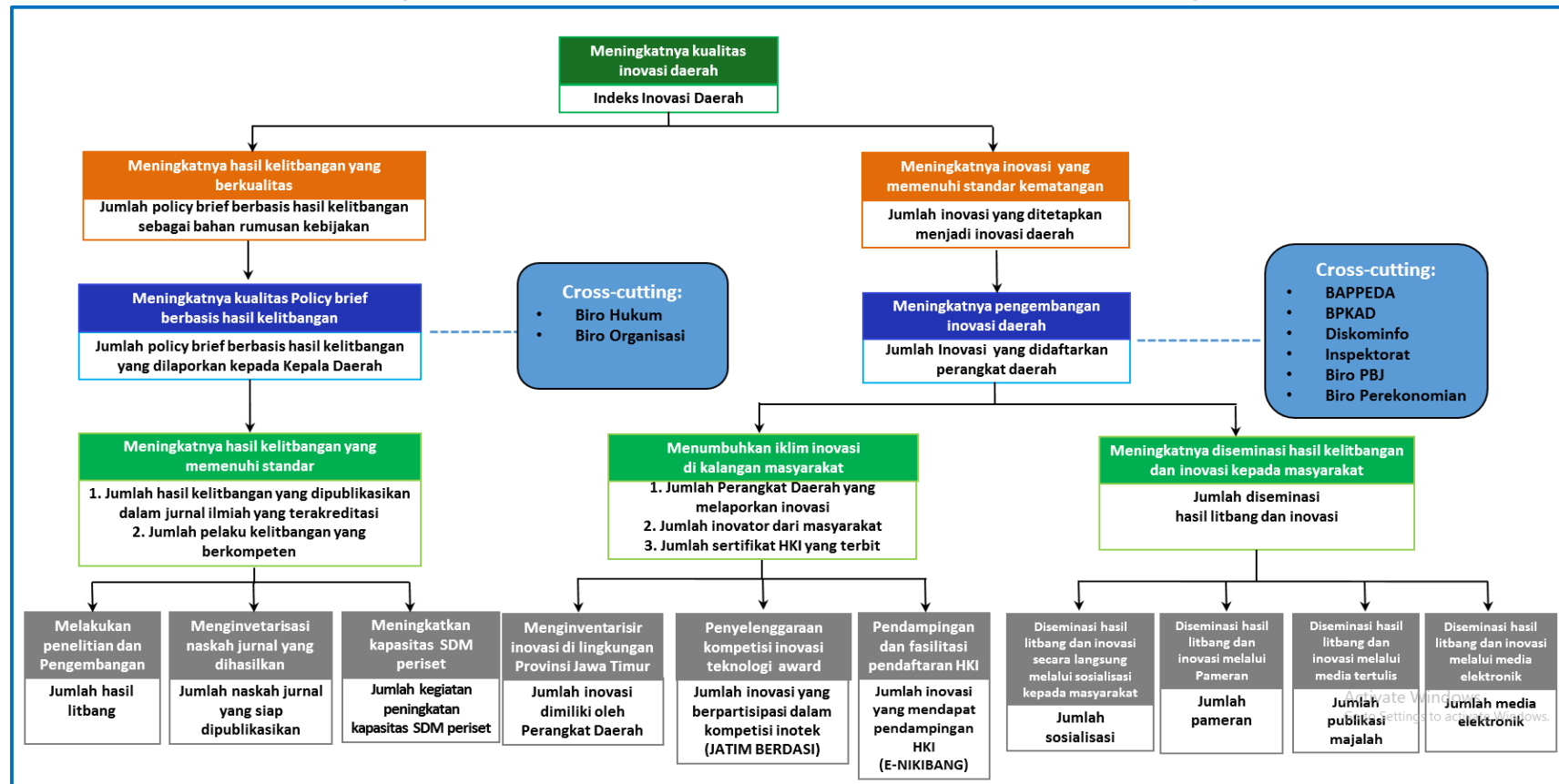
CASCADING

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR



POHON KINERJA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR (Berdasarkan PermenPANRB No. 89 Tahun 2021)






**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



Dr. ANDRIYANTO, SH, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19660609 199001 1 001

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Gayung Kebonsari No. 56, Surabaya
Telp. (031) 8290738 - 8290719 Fax. 8290719

 @bridaprovjatim
 www.brida.jatimprov.go.id
 Brida Jatim

